

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
(BOS) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017**

**( Studi di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah)**

**( TESIS)**

Oleh  
**Noritawati**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
(BOS) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017**

**( Studi di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh  
**Noritawati**

**( TESIS)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS (M.Si)  
Pada  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Tesis : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2017**  
(Studi di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah)

Nama Mahasiswa : **Noritawati**

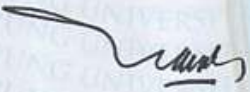
No. Pokok Mahasiswa : **1526061017**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

  
**Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**  
NIP 19630206 198803 1 002

  
**Dr. Dedy Hermawan, M.Si.**  
NIP 19750720 200312 1 002

**MENGETAHUI**

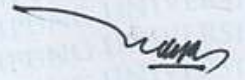
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

  
**Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**  
NIP 19630206 198803 1 002

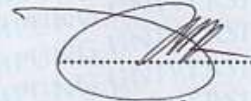
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

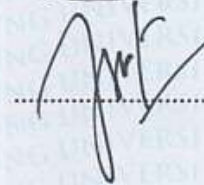
Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Dedy Hermawan, M.Si.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



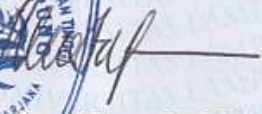
**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19570101 198403 1 020



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **26 Juli 2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : “Penerapan Prinsip-prinsip good governance Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 (Studi di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah) “ adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku .

Bandar Lampung, 23 Juli 2018

Saya membuat pernyataan,



Noritawati  
NPM 1526061017

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017**

**( Studi di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

**NORITAWATI**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan dana BOS di 3 SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah belum dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance*. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi sebagai sampel yang digunakan adalah 9 Orang yang tersebar di tiga Sekolah yaitu : SMPN 1 Kota Gajah, SMPN 1 Bangun Rejo, dan SMPN 3 Terbanggi Besar.. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 3 SMP Negeri yang berada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan prinsip efektif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik, Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 3 SMP Negeri yang berada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan prinsip efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik , Sekolah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan prinsip transparan kurang dilaksanakan dengan baik dan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di di 3 SMP Negeri yang berada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik

**Kata kunci: Pegelolaan BOS, Mutu Pendidikan**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) FOR JUNIOR HIGH SCHOOL IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY IN 2017**

**(Study at 3 State Junior High School in Central Lampung Regency)**

**By**

**NORITAWATI**

The problem in this research is the implementation of BOS fund management in 3 State Junior High School of Central Lampung Regency has not done professionally by applying the principle of god governance. The method used is descriptive with qualitative approach. Population as the sample used is 9 people spread in three schools namely: SMPN 1 Kota Gajah, SMPN 1 Bangun Rejo, and SMPN 3 Terbanggi Besar. The analysis used is descriptive qualitative statistical analysis.

Based on the results of research and pembahasan previously described, the conclusion is obtained as follows: Management of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) funds in 3 SMP Negeri located in Central Lampung Regency based on effective principles implemented well because it has a good tendency value. Managing funds BOS in 3 State Junior High School located in Central Lampung Regency based on efficient principle well implemented because it has good tendency value, School disseminate information of acceptance of BOS program to school citizen by conveying information in teacher board meeting with committee / parents at the beginning school year. Management of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) funds in 3 SMP Negeri in Central Lampung Regency based on transparent principle is not well implemented and Management of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) funds in 3 State Junior High School located in Central Lampung Regency based on accountable principles implemented well because has a good tendency value.

**Keyword : Management , BOS Funds , Educational Quality**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Noritawati lahir di Menggala tanggal 11 November 1975. Penulis merupakan anak keempat dari ke enam bersaudara dari pasangan Bapak M. Saleh Sarkawi (Alm) dan Ibu Yurnani.

Pendidikan yang telah penulis tempuh adalah, Sekolah Dasar SD Negeri 1 Labuan Ratu Bandar Lampung pada tahun 1981 - 1987, SMP Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 1987 - 1990 dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 1990-1993. Pada tahun 1994 penulis diterima sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur UMPTN.

Pada tahun 2010, penulis diterima sebagai guru di SMPN 6 Terbanggi besar, kemudian pada tahun 2012 penulis alih fungsi ke jabatan struktural di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Tahun 2015, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MIA) Konsentrasi Manajemen Publik FISIP Universitas Lampung tahun selesai tahun 2018.



## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini  
Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku :**

### **Ayahanda**

M. Saleh Sarkawi (Alm), akhirnya keinginanmu terwujud meski engkau tiada

### **Ibunda**

Yurnani, wanita terhebat yang aku sayangi yang selalu menjadi semangat dan hadir dalam setiap hidupku

### **Suamiku**

Pudji I. Ismail, yang selama ini selalu mendampingi dan memberi dukungan dalam hidupku

### **Anak-anakku**

Siti Fisti Zalika, Fitrah Alepito, Faris Rizki Alepito dan Siti fahira Ramadhani,  
Penyemangat hidupku dan selalu mendoakan keberhasilanku

### **Kakak dan adikku**

Lisna Nurpida, Yulisman Putra, Yuliansyah, Yunandar, dan Noviliana (alm), yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan studi ini

### **Almamater Tercintta Universitas Lampung**

Yang membanggakan dan telah memberikan ilmu dan pengalaman

## SANWACANA

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya hingga terselesaikannya tesis ini yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017” (Studi Di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah).

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi (M.Si) di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa kehendak Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Sudjarwo, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama Penulisan tesis ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si selaku Dosen Penguji yang memberikan telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan penyusunan Tesis ini;

6. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung;
7. Seluruh Staf Administrasi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung dan Karyawan TU Fisip Unila yang membantu dan melayani urusan administrasi perkuliahan;
8. Bapak Drs. Sukisno, MM selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Terbanggi Besar;
9. Bapak Suhandi, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bangun Rejo;
10. Bapak Sukirno S.Pd, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kotagajah;
11. Pimpinan dan teman-teman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan dukungan, waktu dan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi (MIA) angkatan 2015, terimakasih sudah menjadi keluarga baru, terimakasih atas kebersamaannya, semoga silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik.;
10. Semua Pihak yang telah membantu terselesaikannya Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis mengharapkan agar Tesis ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi.

Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis,

**NORITAWATI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	18
1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah .....	18
2. Dasar Hukum BOS .....	19
3. Tujuan BOS .....	20
4. Sasaran Program dan Besar Dana BOS SMP .....	21
5. Pengelolaan Dana BOS .....	22
6. Prinsip Pengelolaan Dana BOS .....	33
B. Pengelolaan Keuangan Sekolah .....	35
1. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah.....	35
2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah.....	36
3. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah .....	36
C. Pembiayaan Pendidikan .....	29
D. Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i> .....	38
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	38
2. Komponen <i>Good Governance</i> .....	42

E. Mutu Pendidikan .....	45
F. Penelitian yang Relevan .....	48

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	56
B. Fokus Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian .....	57
D. Jenis Dan Sumber Data .....	57
E. Informan Penelitian .....	59
F. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data .....	59
G. Teknik Analisa Data .....	59
H. Teknik Keabsahan Data .....	60

### **BAB IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....**

62

### **BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	74
1. Pengelolaan Dana BOS yang menerapkan Good Governance .....	74
2. Pengelolaan Dana BOS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan.....	95
B. Pembahasan .....	99

### **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Bantuan Dana BOS SMPN 3 Terbanggi Besar .....	21
2.2 Bantuan Dana BOS SMPN 1 Bangun Rejo .....	21
2.3 Bantuan Dana BOS SMPN 1 Kotagajah .....	21
2.4 Ketentuan Penggunaan Dana BOS .....	31
2.5 Perbedaan istilah Government dan Governance .....	39
4.1 Jumlah Sekolah di Kabupaten Lampung Tengah .....	66
4.2 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang dan Status .....	67
4.3 Distribusi Siswa SMP Kabupaten Lampung Tengah .....	67
5.1 Kesimpulan dari Hasil Wawancara Aspek Efektifitas Perencanaan Dana BOS .....	75
5.2 Kesimpulan dari Hasil Wawancara Aspek Efektifitas Pengelolaan Dana BOS .....	78
5.3 Kesimpulan dari Hasil Wawancara Aspek Efektifitas Pengawasan Dana BOS .....	81
5.4 Kesimpulan dari Hasil Wawancara Aspek Transparansi Perencanaan Dana BOS .....	89
5.5 Kesimpulan dari Hasil wawancara Aspek Transparansi Pengelolaan Dana BOS .....	90
5.6 Kesimpulan dari Hasil Wawancara Aspek Transparansi Pengawasan Dana BOS .....	91
5.7 Matrix Prinsip Good Governance Pengelolaan BOS 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah .....	95

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan secara umum program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu. Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk: Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa negeri dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka negeri terhadap biaya operasi sekolah, Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Permendagri RI Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pasal 1 butir (13) menjelaskan bahwa Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan

tahun. Kebijakan tentang BOS pendamping dari pemerintah daerah karena menyadari akan kebutuhan biaya pendidikan cukup besar untuk dipikul oleh pemerintah pusat saja, tiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping BOS sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah dengan kebijakan ini menegaskan bahwa BOS bukanlah menggratiskan biaya sekolah, tetapi program untuk meringankan beban orangtua yang tidak mampu.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberhasilan pelaksanaan BOS dapat dilihat dari percepatan penuntasan wajib belajar.

Konsep bantuan operasional sekolah (sekolah gratis) adalah menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan seluruh iuran sekolah dan penyediaan bantuan transportasi. Sedangkan Sekolah penerima biaya operasional harus menggratiskan iuran-iuran sekolah yang akan digunakan untuk membiayai beberapa komponen pembiayaan pendidikan sebagai berikut. Rincian biaya yang harus digratiskan meliputi uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan. Selain itu, biaya pemeliharaan, ujian



sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian juga harus digratiskan.

Dana bantuan operasional sekolah yang diperuntukan untuk semua murid di Indonesia tidak memandang apakah orang tua murid tersebut kaya atau miskin dan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana sekolah. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: a) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya; b) Operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; c) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); dan d) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. Keberadaan kebijakan tersebut setelah munculnya permasalahan wajib belajar yang tersendat diakibatkan oleh sulitnya orang tua membiayai anak untuk sekolah, hingga saat ini masih menghadapi problem besar dalam menuntaskan program kendala anak bersekolah biasanya berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, serta berkaitan dengan biaya pendidikan yang dirasakan berat oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Kebijakan tentang Bantuan Operasional Sekolah banyak sekali menuai permasalahan yang tidak seharusnya terjadi di dalam dunia pendidikan, yaitu diantaranya kasus tentang terlambatnya pendistribusian dana BOS hingga tingkat sekolah, masih rawannya penyelewengan dana BOS di tingkat kabupaten/kota,

hingga kasus penyelewengan dana BOS di tingkat sekolah dikarenakan dana BOS yang disalurkan harus melalui daerah, selanjutnya kabupaten/kota barulah dana itu sampai di sekolah.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: 1) pengembangan perpustakaan, 2) kegiatan penerimaan peserta didik baru, 3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 4) kegiatan ulangan dan ujian, 5) langganan daya dan jasa, 6) perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, 7) pembayaran honorarium bulanan, 8) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, 9) pembiayaan pengelolaan sekolah, 10) pembelian dan perawatan perangkat komputer, dan 11) biaya lainnya jika komponen nomor 1-10 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Agar pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dibentuklah tim manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, penanggung jawab pelaksanaan program BOS adalah kepala sekolah dengan anggota bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. Pengelolaan dana BOS yang menjadi fokus penelitian ini adalah

pengelolaan yang dilaksanakan oleh internal sekolah dalam hal ini kepala sekolah selaku ketua Tim Manajemen BOS sekolah.

Pengelolaan dana BOS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan dana BOS. perencanaan selalu terkait dengan konsep manajemen dan administrasi karena perencanaan merupakan unsur dan fungsi yang pertama dan utama dalam konsep manajemen maupun administrasi. Mulyasa (2006:173) menyatakan, “Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah”. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Perencanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Dalam buku perencanaan dan penganggaran sekolah/madrasah (Kemdiknas dan Kemenag, 2011:8) disebutkan bahwa dalam menentukan kondisi sekolah saat ini, ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: 1) melakukan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah, 2) membandingkan Hasil Evaluasi Diri (Kondisi Nyata) Sekolah/Madrasah dengan Acuan Standar Sekolah/Madrasah, 3) merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/ Madrasah.

Menurut Sagala (2010:224) dalam menyusun RAPBS harus diketahui lebih dulu budget yang tersedia, yaitu: 1) rencana operasional keuangan mencakup estimasi

tentang pengeluaran untuk suatu periode/waktu, 2) rencana sistematis untuk efisiensi pemanfaatan tenaga, industri, dan 3) rencana keuangan yang diprioritaskan dengan pola pengawasan operasional pada masa datang suatu lembaga. Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan *sharing* dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana *blockgrant* atau lainnya yang bersifat lebih luwes. Menurut Mulyasa (2006:176) untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh

peserta rapat yang hadir. Pelaksanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yaitu: 1) kegiatan penerimaan, 2) kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, oleh sebab itu perlu memperhatikan prosedur penggunaannya sehingga dapat maksimal membiayai kegiatan pendidikan yang telah dibuat dalam perencanaan (RAPBS).

Pelaksanaan kegiatan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi *otorisator*, *ordonator* dan bendaharawan. *Otorisator* adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. *Ordonator* adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Lasari (2011:2) mengemukakan dua jenis kegiatan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan anggaran keuangan sekolah, yaitu: 1) kegiatan pengendalian keuangan sekolah, dan 2) kegiatan proses pencatatan keuangan sekolah. Kegiatan pengendalian keuangan sekolah merupakan usaha-usaha seorang administrator agar kegiatan pengadaan dan penggunaan keuangan sekolah mengarah secara tepat pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal berkat adanya tindakan-tindakan secara bertanggung jawab, terbuka, jujur, tertib, cermat, kreatif, efektif, dan efisien. Pengendalian keuangan sekolah ini terutama pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), yakni suatu pernyataan mengenai

uraian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sekolah sebagai belanja sekolah selama satu tahun anggaran.

Mulyasa (2006:177) menyatakan, “Sesuai dengan semangat Manajemen Berbasis Sekolah, kepala sekolah berwenang penuh untuk mengatur masalah pendanaan pendidikan di sekolahnya. Meskipun demikian, ia harus tetap memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran”. Kegiatan proses pencatatan keuangan sekolah meliputi kegiatan penerimaan dan penyimpanan, penggunaan dan pertanggungjawabannya. Lasari (2011:2) menyatakan bahwa pencatatan harus dilakukan secara tanggungjawab, terbuka, jujur, tertib, cermat, aman, benar, sah, efektif, dan efisien oleh bendaharawan

Agar program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan (monitoring) secara efektif dan terpadu. Pengevaluasian menurut Amtu (2011:62) adalah “Proses pengawasan dan pengendalian *performa* sekolah untuk memastikan bahwa jalannya penyelenggaraan kegiatan di sekolah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Evaluasi yang dapat dilakukan pihak terkait terhadap pengelolaan dana BOS adalah evaluasi program penggunaan dana BOS. Evaluasi pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan oleh internal maupun eksternal sekolah. Evaluasi internal dilaksanakan oleh evaluator sekolah yaitu Tim Manajemen BOS sekolah.

Evaluasi internal lebih bersifat pembinaan dan evaluasi diri. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak luar sekolah yang telah diberikan mandat oleh pemerintah untuk memeriksa ataupun melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Pelaksana evaluasi

eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengawasan (*monitoring*) menurut Akdon (2009:192) perlu diselenggarakan secara sistematis dan objektif untuk menemukan apakah informasi mengenai jalannya kegiatan atau program dan keuangan telah dilakukan secara akurat dan dapat dipercaya. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Pelaporan adalah bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS di sekolah. Akdon (2009:204) menyatakan, "Laporan adalah komunikasi objektif dan teratur mengenai informasi fakta yang melayani tujuan manajemen". Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis oleh bendaharawan. Isi laporan pertanggungjawaban itu mengenai penerimaan dan pengeluaran dana sekolah dalam bentuk surat

pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulan dan setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan penggunaan anggaran BOS di sekolah dibuat dalam dua periode yaitu laporan bulanan dan laporan triwulan. Laporan BOS kadang-kadang dilengkapi dengan pemeriksaan langsung terhadap pembukuan dan penyimpanan uang tunai serta tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan tersebut dimaksudkan agar bendaharawan dapat melaksanakan dengan benar, sah, efisien dalam menerima, menyimpan, dan menggunakan keuangan sekolah demi keselamatan keuangan sekolah. Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam satu bulan dan triwulan dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin pengelolaan dana BOS transparan dan akuntabel serta mampu memenuhi tuntutan dan rasa keadilan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan anggota komite sekolah agar dapat mengambil peran yang semestinya dan benar-benar berfungsi sebagai lembaga kontrol yang efektif baik dalam proses perumusan RAPBS maupun pada aspek pemanfaatan dana-dana sekolah.

Menurut Bastian (2007:52), dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terbatasnya alokasi dana dari pemerintah adalah salah satu kendala yang membuat kualitas pendidikan sekolah belum juga membaik. Sekolah harus menggunakan dana dengan seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan sekolah. Apabila dana dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah dapat mengupayakan melalui dana dari masyarakat. Pengelolaan dana dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas



dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui untuk apa dana sekolah itu dibelanjakan. Selama ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekarang laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh setiap sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari realisasi anggaran, laporan surplus defisit dan siswa. Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Selanjutnya Pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan. Atau dengan kata lain, pelaporan keuangan sekolah harus dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke sekolah tersebut.

Berdasarkan Kepmendagri 13/2006 tentang Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah, akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Lebih lanjut akuntabilitas dapat dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Dalam hal ini, akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Sedangkan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Informasi adalah informasi mengenai semua aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Prinsip ini memiliki dua aspek, yakni 1) aspek komunikasi publik oleh pemerintah, dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Hal ini akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerja, karena manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengidentifikasi adanya gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih belum terpenuhinya kebutuhan sekolah yang sangat diperlukan, sedangkan bantuan untuk operasional sekolah sudah lama berjalan. Seperti perlengkapan penunjang untuk kegiatan olahraga seperti bola, net bola voli, net takraw juga masih belum diganti dengan yang baru, kursi dan meja untuk belajar siswa sudah banyak yang rusak dan belum diperbaiki atau bahkan diganti.
2. Sekolah masih sering terlambat dalam mengantar atau menyerahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada Dinas Pendidikan.
3. Masih adanya kegiatan yang direalisasi kurang sesuai dengan yang telah direncanakan pemerintah seperti bantuan pendistribusian buku ke sekolah- sekolah tidak tepat sasaran dan pendistribusian buku-buku kesekolah tidak didasarkan pada rencana yang cermat atau usulan kebutuhan dari sekolah.

4. Kemudian kegiatan yang direalisasi kurang efektif dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah konsumsi rapat guru sebaiknya dana tersebut dapat dialokasikan pada kegiatan siswa
5. Pada beberapa sekolah dana BOS digunakan dan dipeuntukkan dengan prosentasi yang cukup besar untuk pembayaran guru tidak tetap, seharusnya bisa melalui anggaran pemerintah daerah atau alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Penting pengelolaan dana BOS SMP yaitu dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS SMP dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan dana BOS SMP, karena sekolah merupakan instansi terkait langsung dalam pengelolaan dana BOS. Kesalahpahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan BOS SMP.

Hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS ke-3 Sekolah menengah Pertama tahun 2017, bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMP berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah, guru-guru dan komite sekolah. Hasil rapat tersebut kemudian tertuang menjadi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh Bendahara BOS untuk dimintai tindak lanjut kepada Dinas Kabupaten., bila terjadi perubahan aturan mengenai penggunaan Dana BOS SMP maka menjadikan sekolah

melakukan penyusunan RAB BOS perubahan dengan disesuaikan pada penggunaan Dana yang terdapat di petunjuk teknis BOS SMP yang baru.

Evaluasi eksternal dari Dinas Pendidikan Kabupaten menemukan ada kesalahan pembukuan kelebihan dana oleh sekolah. Kesalahan pembukuan ini menjadikan sekolah masih harus menyusun pembukuan ulang di akhir periode. Penyusunan pembukuan yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu dengan melakukan pencatatan kelebihan dana sampai akhir periode anggaran.

Publikasi yang dilakukan ke-3 sekolah terkait Pengelolaan Dana BOS SMP dapat dikatakan berlangsung cukup baik. Kepala Sekolah secara transparan memasang ringkasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di papan pengumuman. Awal atau akhir tahun diselenggarakan rapat pleno Komite Sekolah, yang diikuti oleh Komite Sekolah, orang tua/wali siswa dan diikuti oleh Kepala Sekolah beserta guru. Pelaksanaan rapat untuk mensosialisasikan rencana anggaran terkait RKAS dan RAB BOS SMP pada tahun anggaran selanjutnya dan mempublikasikan hasil Pengelolaan Dana BOS SMP yang telah terlaksana kepada orang tua/wali siswa.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS, pihak sekolah harus didukung dengan prinsip *Good Governance*. Sulit dipungkiri, istilah *Good Governance* kian populer. *Good governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Daniri, 2005). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta efisien merupakan bagian dari pilar "*good governance*" dan berkaitan erat dengan tata kelola pendidikan (*good education governance*).

Dengan kata lain manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktifitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Efek dari penerapan prinsip GCG salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola suatu instansi belum memenuhi ekspektasi. Menurut Juran (1993) kualitas adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. ISO 8402 (*Quality Vocabulary*) mendefinisikan Manajemen Kualitas sebagai semua aktifitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas (*quality planning*), pengendalian kualitas (*quality control*), jaminan kualitas (*quality assurance*), dan peningkatan kualitas (*quality improvement*).

Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupinya, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 (Studi di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung Tengah)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BOS di 3 SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sbb :

1. Untuk mengetahui gambaran umum pengelolaan dana BOS di 3 SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BOS di 3 SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sbb:

1. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan ilmu administrasi khususnya ilmu administrasi publik dalam bagian manajemen publik.
2. Secara praktis,
  - a. Bagi peneliti  
hasil penelitian ini dapat melihat bagaimana pengelolaan dana BOS yang menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparansi dapat meningkatkan mutu pendidikan.

- b. Bagi Pemerintah  
Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan dan buku panduan pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMP.
- c. Bagi pihak sekolah penerima Dana BOS SMP Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih transparan dalam pengelolaan dana BOS SMP
- c. Bagi Komite Sekolah  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS SMP.
- e. Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat  
Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah Pengelolaan Dana BOS SMP sudah wajar atau tidak

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

#### **1. Pengertian Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program dana BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/ SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf



Internasional (SBI). Sumbangan/ pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/ pungutan tidak boleh berlebih;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

## **2. Dasar Hukum BOS**

Dasar Hukum Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- f) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan terakhir Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

- h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.

### **3. Tujuan BOS**

Menurut Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tujuan BOS SMP dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan BOS SMK adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus BOS adalah:

- a) Membantu biaya operasional non personalia sekolah
- b) Mengurangi angka putus sekolah siswa
- c) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa
- d) Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa dengan cara meringankan biaya sekolah
- e) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
- f) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

### **4. Sasaran Program dan Besar Dana BOS SMP**

Sasaran Program adalah untuk SMP Negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) SMP Negeri yang berada di Kabupaten

Lampung Tengah. Adapun besaran BOS diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa dengan rincian sbb :

**Tabel. 2.1 Bantuan Dana BOS SMPN 3 Terbanggi Besar**

Tahap Penyaluran	Jumlah Siswa	Satuan Biaya	Total Alokasi
TW I	746	20 %	Rp. 149.200
TW II	746	40 %	Rp. 298.400
TW III	746	20 %	Rp. 149.200
TW IV	696	20 %	Rp. 139.200
		<b>Total</b>	<b>Rp. 736,000</b>

*Sumber : Departemen Pendidikan Propinsi Lampung, 2018*

**Tabel 2.2 Bantuan Dana BOS SMPN 1 Bangun Rejo**

Tahap Penyaluran	Jumlah Siswa	Satuan Biaya	Total Alokasi
TW I	646	20 %	Rp. 129.200
TW II	646	40 %	Rp. 258.400
TW III	643	20 %	Rp. 128.600
TW IV	663	20 %	Rp. 132.600
		<b>Total</b>	<b>Rp. 648.800</b>

*Sumber : Departemen Pendidikan Propinsi Lampung, 2018*

**Tabel 2.3 Bantuan Dana BOS SMPN 2 Kota Gajah**

Tahap Penyaluran	Jumlah Siswa	Satuan Biaya	Total Alokasi
TW I	695	20 %	Rp. 139.000
TW II	695	40 %	Rp. 278.000
TW III	689	20 %	Rp. 137.800
TW IV	751	20 %	Rp. 150.200
		<b>Total</b>	<b>Rp. 705.000</b>

*Sumber : Departemen Pendidikan Propinsi Lampung, 2018*

## 5. Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS terbagi atas :

### a. Perencanaan Dana BOS

Perencanaan adalah penyusunan anggaran Dana BOS yang dilakukan sekolah untuk menetapkan anggaran Dana BOS, meliputi tahap penyusunan

RKAS dan penyusunan RAB BOS. Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kualitatif) dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai siapa yang bertanggungjawab, dan mengapa hal itu harus dicapai (Beishline dalam M.Manullang, 2008: 40).

Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak penerima Dana BOS untuk melaksanakan Pengelolaan Dana BOS . Pemberian kebebasan ini mencakup Perencanaan Pengelolaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah penerima dana BOS. Program BOS memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu :

- 1) Kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditunjukkan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Pengelolaan program BOS menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan komite sekolah dan masyarakat.
- 2) Sekolah mengelola dan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) tahunan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.

- 3) RKJM, RKT, dan RKAS harus dibahas dalam rapat dewan guru/pendidik, kemudian disetujui/ditandatangani kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disetujui/ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SMP negeri) atau yayasan (untuk SMP swasta).
- 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS yang merupakan kompilasi dana dalam RKT/RKAS harus disetujui/ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Yayasan (untuk SMP swasta) dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Jadi, dapat disimpulkan dalam Perencanaan Dana BOS, sekolah harus menentukan pertimbangan tugas dan tujuan pada tahun anggaran Dana BOS. Penentuan tugas dan tujuan didasarkan atas pengajuan dari guru dan karyawan yang mana dirangkum dalam RKAS dan RAB BOS SMP. Hasil dari penyusunan tersebut akan dimintai pertimbangan kepada Komite Sekolah, yang kemudian akan disetujui oleh Kepala Sekolah.

#### **b. Pelaksanaan Dana BOS**

Pelaksanaan Dana BOS ini, terdiri dari penyaluran Dana BOS, pengambilan Dana BOS, penggunaan Dana BOS, pembelajaran Dana BOS, pembukuan Dana BOS, pengembalian Dana BOS, dan perpajakan terkait Dana BOS . Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMP terdiri dari

##### **1) Penyaluran Dana BOS SMP**

Tahap penyaluran Dana BOS adalah sebagai berikut :

**a) Penyaluran Dana BOS SMP**

- (1) Penyaluran dana BOS dilakukan oleh Direktorat Pembinaan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP0 dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan :
  - (a) SK Direktur Pembinaan SMP tentang daftar sekolah penerimaan dana program BOS SMP.
  - (b) Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMP dengan Bank/Pos penyalur.
  - (c) Kwitansi penyerahan dana BOS SMP dari Direktorat pembinaan SMP kepada Bank/Pos penyalur.
- (2) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- (3) Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank/Pos penyalur.  
Selanjutnya Bank/Pos penyalur menyalurkan dana BOS SMP langsung ke rekening sekolah. Teknis penyaluran dana BOS SMP tersebut diatur dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat pembinaan SMP dengan Bank/Pos penyalur.

**2) Pengambilan Dana BOS SMP oleh sekolah**

Adapun beberapa ketentuan pengambilan dana BOS adalah sebagai berikut :

- a) Syarat Pengambilan, Sekolah wajib menunjukkan dokumen berikut kepada Bank Penyalur dengan melampirkan
- (1) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah;
  - (2) Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah;
  - (3) Akte Pendirian Sekolah atau Surat Ijin Operasional Sekolah yang masih berlaku;
  - (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Kepala Sekolah;
  - (5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Bendahara Sekolah;
  - (6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMP negeri);
- b) Batas waktu Konfirmasi Rekening dan Pengambilan Dana Sekolah harus/wajib menkonfirmasi rekening sekolah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana BOS transfer ke rekening sekolah

### **3) Penggunaan Dana BOS SMP**

Dana BOS SMP digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah, yang meliputi :

#### **1. Pengadaan buku Kurikulum 2013**

Biaya pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013 sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan .

2. Pengadaan buku Teks Pelajaran

Biaya pembelian buku untuk mengganti buku yang rusak.  
Menambah referensi buku teks pelajaran.

3. Pengadaan alat tulis sekolah

Biaya pembelian alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar dan pengelolaan sekolah.

4. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran

Biaya untuk naskah soal, pengadaan soal ulangan tengah semester, ulangan umum, dan ujian sekolah.

5. Pengadaan alat habis pakai Pembelian alat-alat habis pakai dalam waktu setahun atau kurang.

6. Pengadaan bahan habis pakai Meliputi pembelian bahan: Pratikum IPA dan Peralatan olahraga

7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ ekstrakurikuler Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti: pramuka, palang merah remaja (PMR), kegiatan pembinaan olimpiade sains, seni, olahraga, OPSI, LDK, dll

8. Pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana/prasarana sekolah  
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah agar tetap



9. Langganan daya dan jasa lainnya

Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti: listrik, telepon, air, internet, dan lainnya.

10. Kegiatan penerimaan siswa baru

Biaya untuk pengadaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, dan penentuan peminataan. Meliputi biaya fotocopy, konsumsi, transportasi, panitia, dan psikotes.

11 Penyusunan dan pelaporan

Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang. Meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan BOS.

12. Website, CCTV, software pembelajaran

Biaya untuk membangun website sekolah dengan domain “sch.id”, Biaya pengadaan CCTV digunakan untuk pengawasan pelaksanaan ujian nasional.

13 Pengelolaan data

**4) Pembelanjaan Dana BOS**

Pembelanjaan perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin (Bambang Riyanto, 2001:6). Fungsi pembelanjaan menurut terdiri atas :

- a) Fungsi menggunakan dengan mengalokasikan dana yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif investasi atau keputusan investasi, dan
- b) Fungsi memperoleh dana atau fungsi pendanaan yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif pendanaan atau keputusan pendanaan.

Pembelajaan Dana BOS SMP adalah seluruh aktivitas membeli barang atau jasa yang pemanfaatannya berasal dari Dana BOS SMP. Pelaksanaan pembelajaran Dana BOS SMP memiliki prosedur dan pertimbangan tersendiri sesuai dengan prosedur sekolah.

#### **5) Pembukuan Dana BOS**

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat 26 menjelaskan tentang pengertian pembukuan : Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyerahkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhir. Kegiatan pembukuan merupakan kegiatan pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran Dana BOS, Pembukuan perlu dilakukan oleh pihak pengelola Dana BOS karena untuk proses pembuktian dan merangkum semua kegiatan terkait dengan dana supaya saat pemeriksaan laporan keuangan sekolah sudah tertata rapi dan dapat dipahami oleh tim pemeriksa.

## **6) Pengembalian Dana BOS**

Sekolah yang menerima jumlah dana lebih besar dari realisasi siswa yang ada, sekolah wajib mengembalikan kelebihan dana yang diterima, dengan aturan sebagai berikut :

- a) Pengembalian Dana pada tahun anggaran berjalan
- b) Pengembalian Dana setelah tahun anggaran

## **7) Perpajakan terkait Dana BOS**

Ketentuan pajak dalam pengelolaan Dana BOS mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku, antara lain :

- a) Pajak dipungut untuk setiap transaksi sesuai ketentuan.
- b) Pajak yang sudah dipungut wajib diseorkan melalui Bank Persepsi/Kantor pos dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c) Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- d) Pembebanan biaya materai sebesar Rp3.000,00 untuk transaksi pembelian diatas Rp250.000,00 s.d Rp1.000.000,00 dan biaya materai Rp6.000,00 untuk transaksi pembelian diatas Rp1.000,00.

### **c. Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS**

Pengawasan dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS . pengawasan oleh pihak internal yaitu Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Pengawasan eksternal yaitu Dinas Pendidikan Provinsi maupun Pusat. Evaluasi dimaksudkan untuk

penentuan alternatif atau pilihan yang tepat dilakukan sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap pengelolaan dana BOS .

#### d. Pelaporan Dana BOS

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh sekolah terhadap Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Pelaporan Dana BOS berupa laporan lengkap dan laporan ringkas. Laporan tersebut terangkum dalam bentuk hard file dan soft file untuk dilakukan publikasi kepada pemerintah dan atau masyarakat

**Tabel 2.4 Ketentuan Penggunaan Dana BOS**

No	Penggunaan Dana	Penjelasan
1	Pengembangan perpustakaan	Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk peserta didik dan buku panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah, baik sekolah sebagai penyelenggara kurikulum 2013 atau penyelenggara kurikulum 2006.
2	Penerimaan peserta didik baru	Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang peserta didik lam) Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual,</li> <li>b. Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah,</li> <li>c. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan,</li> <li>d. Pemantapan persiapan ujian,</li> <li>e. Olahraga, kesenian, KIR, pramuka, dan ekstrakurikuler</li> </ul>

No	Penggunaan Dana	Penjelasan
		<p>yang sesuai dengan kebutuhan sekolah lainnya,</p> <p>f. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan,</p> <p>g. Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah pusat/pemerintah daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam mengikuti lomba, dan biayai pendaftaran mengikuti lomba.</p>
4	Kegiatan evaluasi pembelajaran	Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional.
5	Pengelolaan sekolah	<p>a. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, dsb</p> <p>b. Pembelian alat tulis kantor</p> <p>c. Dsb...</p>
6	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah	<p>a. Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)</p> <p>b. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah,</p> <p>c. Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)</p>
7	Layanan daya dan jasa	a. Biaya langganan listrik, air

No	Penggunaan Dana	Penjelasan
		<p>dan/atau telepon</p> <p>b. Pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah dan/atau penambahan daya listrik.</p> <p>c. Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar atau prabayar, baik dengan fixed modem atau mobile modem</p>
8	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	<p>a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, dan/atau perbaikan pintu dan/atau jendela</p> <p>b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk peserta didik/guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.</p> <p>c. Perbaikan sanitasi sekolah untuk menjamin kamar mandi dan/atau jamban/WC peserta didik berfungsi dengan baik.</p> <p>d. Perbaikan saluran pembuangan dan/atau saluran air hujan.</p> <p>e. Perbaikan lantai dan/atau perawatan fasilitas sekolah lainnya</p>
9	Pembayaran honor	<p>a. Guru honorer</p> <p>b. Tenaga administrasi</p> <p>c. Pegawai Perpustakaan</p> <p>d. Penjaga sekolah</p> <p>e. Petugas satpam</p> <p>f. Petugas Kebersihan</p>
10	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran	<p>a. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/ALL in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran.</p> <p>b. Membeli printer atau printer</p>

No	Penggunaan Dana	Penjelasan
		plus scanner maksimal 1 unit/tahun. c. Membeli laptop maksimal 1 unit/dengan harga maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
11	Biaya lainnya	Apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-10 telah terpenuhi pembiayaannya dan masih terdapat kelebihan BOS, maka BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat bersama dengan dewan guru dan komite sekolah.

## 6. Prinsip Pengelolaan Dana BOS

Menurut Petunjuk Teknis BOS tahun 2017 Pengelolaan program BOS SMP mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) yang mengandung arti, yaitu:

### 1) Swakelola dan Partisipatif

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2) Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

3) Akuntabel

Pengelolaan dana harus dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati.

5) Efektif dan Efisien

Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Siswa yang dibebaskan dana/atau dibantu biaya sekolahnya harus disepakati secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Menurut Petunjuk Teknis BOS tahun 2017 Pengelolaan program BOS memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan, untuk menentukan siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya dan memberikan dukungan dalam wujud finansial, memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrolan kualitas pelaksanaan program, dan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.
- 2) Program kerja yang sudah direview oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan.
- 3) Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan.
- 4) Informasi pengelolaan program ini harus mudah diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman dalam pengelolaan dengan menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.



- 5) Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOS. apabila terjadi pengantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggungjawab pejabat lama. Kepala sekolah lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Kepala sekolah baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sedang disepakati.

## **B. Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2007: 2) pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan.

### **1. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, (Mulyono, 2010: 172) adalah :

- 1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- 2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
- 3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

## 2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Prinsip Keadilan  
Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- 2) Prinsip efisiensi  
Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- 3) Prinsip transparansi  
Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga :
  - a) Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.
  - b) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- 4) Prinsip akuntabilitas publik  
Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Suharsimi Arikunto (2008: 317) menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: (1) penyusunan anggaran (*budgeting*), (2) pembukuan (*accounting*), dan (3) pemeriksaan (*auditing*). Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E. Mulyasa (2007: 48) mengemukakan bahwa:

Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik- baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang

berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah meliputi: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaporan.

### **C. Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan (Indra Bastian, 2006: 160). Mengenai konsep pembiayaan pendidikan (Nanang Fattah, 2002: 23) mengemukakan bahwa, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah anggaran yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. SMP Negeri umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan dari pemerintah pusat, dan sumber lainnya. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan porsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, serta dari waktu ke waktu.

Biaya penyelenggaran dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Biaya investasi, yang terdiri atas :
  - 1) Biaya investasi lahan pendidikan, dan

2) Biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. Biaya operasi yang terdiri atas :

1) Biaya personalia, dan

2) Biaya non-personalia.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang, pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi biaya yang akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga.

#### **D. Tinjauan Tentang *Good Governance***

##### **1. Pengertian *Good Governance***

Menurut Ndraha (2003: 69) *governance* berasal dari kata kerja Inggris *gover* (memerintah) berasal dari kata lain *gubernare* atau *gerik kybernan*, artinya mengemudikan (sebuah kapal), jadi “memerintah” disini berarti mengemudikan. Kata bendanya adalah *governance* (latin: *governantia*), menunjukkan metode atau sistem mengemudi atau manajemen organisasi. Istilah *governance* dan *government* adalah dua pengertian yang berbeda. Kata kerja *gover* digunakan dilapangan politik, kata bendanya *government*, *governance* lebih sebagai gejala sosial, sedangkan *government*, gejala politik.

Dewasa ini ada kecenderungan untuk mengembalikan makna pemerintahan dari *government* ke *governance* (yang lebih luas), sekurang-kurangnya menghidupkan

kembali konsep *governance*, *government* dapat diartikan pemerintah dan dapat juga diartikan pemerintahan. Wasistiono membedakan istilah *governance* dan *government* dapat dilihat pada tabel 1 :

**Tabel 2.5 Perbedaan Istilah *Government* dan *Governance***

No.	Unsur Perbandingan	Kata <i>Government</i>	Kata <i>Governance</i>
1.	Pengertian-pengertian badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negara, cara pengguna, atau pelaksana	Badan/lembaga atau fungsi yang dijadikan oleh organ tertinggi dalam suatu negara	Cara, penggunaan, atau pelaksana
2.	Hubungan	Hirakis yang memerintah diatas, yang diperintah dibawah	Hirakis, kesetaraan, kedudukan dan hanya berada dalam fungsi
3.	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu instansi pemerintah	Sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat
4.	Pemegang peran dominan	Sektor pemerintah	Semua komponen memegang peranan sesuai fungsi masing-masing
5.	Efek in pact yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6.	Hasil (output) yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi warga negara dan warga masyarakat

Sumber: Syarief Makhya (2004: 61)

Menurut Ashari dan Fernanda (2001: 52) istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, melainkan :

“*Governance* mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan, tidak mengherankan apabila terdapat istilah *publik governance*, *private governance*, *corporate governance* dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi

populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

*Good governance* dalam Ashari dan Fernanda (2001: 53) menjelaskan kembali

bahwa konsep pemerintahan (*governance*) mencakup beberapa metode yaitu :

“*Governance* merupakan metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Konsep ini juga meliputi mekanisme, proses dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, memenuhi hak-hak hukum, memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara, dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara sesama”.

Menurut Bank Dunia dalam Dwipayana (2003: 9-10) *governance* sebagai tindakan pemegang kekuasaan untuk mengelola urusan nasional. *Governance* juga bisa diartikan sebagai pengelolaan struktur rezim dengan sebuah pandangan untuk memperkuat legitimasi penyelenggaraan kekuasaan dimata kehidupan publik.

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Sedarmayanti (2004: 3) mengandung dua pemahaman :

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada :

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas),

*securing of human rights, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control.*

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

*Good governance* menurut Sinambela (2011: 47) diartikan suatu proses yang mengorientasikan pada kepentingan publik sebagai tujuan utama. *Good governance* diartikan sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Sedangkan menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2012: 4-5) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

## **2. Komponen *Good Governance***

Konsep *good governance* pada awalnya didasari gagasan yang sifatnya interdependensi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif dan berhasil, maka interaksi antara negara, masyarakat, dan pihak swasta harus didasari unsur partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Berikut adalah beberapa definisi yang menjadi indikator *good governance*.

### **a. Akuntabilitas**

Isu akuntabilitas akhir-akhir ini semakin gencar dibicarakan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Bagi lembaga-lembaga pendidikan hal ini mulai disadari dan disikapi dengan melakukan redesign sistem yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Menurut Slamet (2005:5), "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sementara Zamroni (2008:12) mendefinisikan akuntabilitas "*is the degree to which local governments have to explain or justify what they have done or failed to do.*" Lebih lanjut dikemukakan bahwa "*Accountability can be seen as validation of participation, in that the test of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to which people can use participation to hold a local government responsible for its action.*"



Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari *stakeholders* sekolah. Semakin kecil partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah. Definisi konseptual akuntabilitas dalam penelitian ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

#### **b. Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (BAPENAS, 2002: 18)., Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Setyanti, 2011: 51).

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari

masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Transparansi pengelolaan antara lain mencakup: 1) Pengelolaan keuangan, keterbukaan dalam pendapatan dan belanja sekolah baik dari pemerintah, donor maupun sumber-sumber lain, 2) Pengelolaan staff /personalia : kebutuhan ketenagaan, kualifikasi, kemampuan dan kelemahan, kebutuhan pengembangan professional, dsb. 3) Pengelolaan kurikulum, termasuk keterbukaan dalam hal prestasi dan kinerja siswa, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum, visi, misi, dan program peningkatan mutu pendidikan. Definisi konseptual transparansi dalam penelitian ini adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap pemangku kepentingan sekolah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan sekolah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai sekolah.

**c. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Meutia (2000:19) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Menurut Mardismo (2009:18) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Meutia (2000:23) tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Menurut Meutia (2003 : 16) Bentuk Partisipasi yaitu: a) Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen. b) Adanya forum untuk menampung partisipasi. c) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. d) Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi yaitu adanya forum pertemuan dengan kelompok masyarakat (musrenbang) yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. e) Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

### **E. Mutu Pendidikan**

Defenisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam bergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa latin yakni “Qualis” yang berarti *what kind of* (tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan . Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan. (Usman, 2006 : 407). Menurut Sallis (2003) mengemukakan mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk

bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari sudut hukum, dipinisi pendidikan berdasarkan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 1(1 dan 4), yaitu “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”(Husaini Usman:2006:7). Menurut Sunario seperti dikutip Usman (2006:7) potensi otak manusia yang digunakan untuk berpikir baru 4% .Jadi masih 96% dari otak manusia yang belum digunakan untuk berpikir.

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berperoses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas (Usman, 2006 : 410). Mutu dalam konteks manajemen mutu terpadu atau *Total Quality Management* (TQM) bukan hanya merupakan suatu gagasan, melainkan suatu filosofi dan metodologi dalam

membantu lembaga untuk mengelola perubahan secara totalitas dan sistematis, melalui perubahan nilai, visi, misi, dan tujuan. Karena dalam dunia pendidikan mutu lulusan suatu sekolah dinilai berdasarkan kesesuaian kemampuan yang dimilikinya dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Sedangkan menurut Hari Sudradjat (2005 : 17) pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), lebih lanjut Sudradjat mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (*manusia paripurna*) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Namun untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, maka sekolah harus melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berorientasi pada peningkatan mutu.

Husaini Usman (2006 : 411) mengemukakan 13 (tiga) belas karakteristik yang dimiliki oleh mutu pendidikan yaitu :

- a. Kinerja (*performa*) yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah meliputi : kinerja guru dalam mengajar baik dalam memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah favorit
- b. Waktu wajar (*timelines*) yakni sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat.
- c. Handal (*reliability*) yakni usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

- d. Daya tahan (*durability*) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan
- e. Indah (*aesthetics*) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik.
- f. Hubungan manusiawi (*personal interface*) yakni menunjang tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme.
- g. Mudah penggunaannya (*easy of use*) yakni sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam di kembalikan tepat waktu.
- h. Bentuk khusus (*feature*) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (*komputerisasi*).
- i. Standar tertentu (*conformance to specification*) yakni memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
- j. Konsistensi (*consistency*) yakni keajengkan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataannya.
- k. Seragam (*uniformity*) yakni tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam dalam berpakaian.
- l. Mampu melayani (*serviceability*) yakni mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan merasa puas.
- m. Ketepatan (*accuracy*) yakni ketepatan dalam pelayanan misalnya sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

## **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khafifah Julia Dwi 2010 yang berjudul “Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar Negeri I Patuk Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan program bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari: perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi penyusunan RAPBS, identifikasi kebutuhan sekolah yang akan didanai

dengan dana BOS, dan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi kegiatan penyalura dana BOS, penggunaan dana BOS yang disesuaikan dengan RAPBS. Evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari kegiatan pelaporan, monitoring, dan pengawasan. Kegiatan pelaporan dalam bentuk laporan penggunaan dana BOS yang dibuat oleh bendahara setiap triwulan. Kegiatan monitoring dan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dan tim monitoring manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan memeriksa laporan keuangan setiap triwulan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan di sekolah. (2) Hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu besarnya dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah, terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS karena kurangnya waktu dan pengetahuan bendahara dalam pengelola keuangan. (3) cara mengatasi hambatan kekurangan dana BOS yaitu dengan menarik iuran sukarela dari orang tua siswa. Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wahyuni 2011 yang berjudul “Keefektifan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar pada Daerah Miskin di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan: (1) perencanaan anggaran, (2) relevansi pelaksanaan program, (3) pengawasan dan evaluasi program, dan (4) pelaporan pengelolaan dana BOS di sekolah dasar kelurahan Kemayoran

Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perencanaan masuk kategori efektif dilihat dari aspek orientasi tujuan, proses penyusunan dan keterlibatan stakeholder. Kondisi pengelolaan keuangan di dua dari empat sekolah belum kompeten, sedangkan dua sekolah telah memiliki tenaga TU sebagai bendahara. Partisipasi guru bukan bendahara sangat kurang dalam mengelola keuangan. Pelaksanaan penggunaan dana efektif sesuai dengan tujuan dan ketentuan, namun belum dibentuk tim belanja barang. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS sudah cukup baik. Pengawasan oleh kepala sekolah dan Bawasko masuk kategori efektif, walaupun tidak pernah ada evaluasi dana BOS oleh pemerintah daerah/dinas pendidikan. Pelaporan masuk dalam kategori efektif dilihat dari aspek ketentuan pelaporan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadira Sukma (2016) dengan judul. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Di SMA Negeri Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan Dana BOS SMA di SMA Negeri Jumapolo tahun 2013 dan 2014 dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah, guru, Karyawan, dan orang tua siswa. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RAB BOS SMA. (2) Pelaksanaan Dana BOS SMA, penyaluran Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 dalam dua tahap. Pengambilan Dana BOS SMA oleh Bendahara BOS. Penggunaan Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 diperuntukan membiayai kegiatan operasional sekolah non-operasional sebagaimana di petunjuk teknis BOS SMA tahun 2013 dan 2014. Pembelian barang/jasa dilaksanakan oleh tim belanja



barang dengan berdasar prinsip efektif dan efisien. Pembukuan dilakukan oleh Bendahara BOS yang meliputi pembuatan buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Sekolah tidak melakukan pengembalian Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014. Penyetoran pajak oleh sekolah yaitu PPN, PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. (3) Pengawasan dan Evaluasi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelaksanaan secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (4) Pelaporan Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 dilakukan setiap semester melalui LPJ BOS SMA beserta lampiran. Publikasi dilakukan dengan memasang ringkasan RKAS di papan pengumuman dan memberikan selebaran penggunaan Dana BOS SMA kepada wali siswa.

4. Penelitian yang dilakukan Kusno (2017) dengan judul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri. Hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tertuang di dalam buku panduan BOS yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan dana BOS.
5. Penelitian yang dilakukan Ismi Solikhatun (2016) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70%, prinsip transparan dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup

baik 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 96%, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89%.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2013) dengan judul *Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana BOS.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setyawan (2015) dengan judul *Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah baik secara simultan maupun parsial. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sekolah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran pendidikan dalam

mengelola keuangan sekolah; mewujudkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah untuk meningkatkan kepercayaan publik; serta, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak ruang lingkup sampel yang tidak hanya satu sekolah, tapi dalam cakupan yang lebih luas untuk pemetaan daerah dengan tingkat produktivitasnya

8. Penelitian yang dilakukan oleh L. Jurhanie Isfan Pratama (2013) dengan judul analisis pengaruh prinsip *good governance* terhadap pencapaian tujuan dana bantuan operasional sekolah ((studi pada sekolah dasar se-kecamatan kasihan bantul yogyakarta) . Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang berarti dari transparansi suatu pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fierda (2015) yang mengemukakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Sukhemi (2011) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan tentu menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dugaan awal bahwa terdapat berpengaruh positif antara transparansi dengan pencapaian tujuan berhasil dibuktikan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, transparansi memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan.
9. Desy Natalia Krisdayanti (2014) berjudul implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah daerah dan sekolah menengah pertama (studi kasus: Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun komitmen untuk menjalani peran tersebut masih belum terlihat, salah satunya seperti yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan yang perhatiannya terhadap pendidikan masih kurang. Hal ini ditandai dengan minimnya dana pendamping BOS jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pemerintah pusat memiliki tanggungjawab dalam menghindari terjadinya kesenjangan yang mencolok antar daerah, baik dalam proses maupun kinerja sektor pendidikan, untuk itu pemerintah harus segera membuat standarisasi pembiayaan. Diperlukan standarisasi penyaluran dana bantuan yang tegas dari pemerintah, termasuk menyeleksi dengan ketat sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan dana bantuan, bahkan juga diperlukan aturan yang ketat terhadap para pelaku korupsi dana bantuan pendidikan. *Good governance* diperlukan karena tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Institusi dari *good governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Konsep akuntabilitas dalam bidang pendidikan tidak mudah dan akan menghadapi kendala baik dari pihak internal maupun eksternal sekolah yaitu, siswa (peserta didik), guru (pendidik), administrator pendidikan, lembaga pendidikan dan masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dan sering tidak sejalan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan biaya yang besar, namun karena kemampuan pemerintah terbatas,

diharapkan adanya keikutsertaan masyarakat dan investasi dari pihak swasta. Di lain pihak masyarakat menginginkan mutu pendidikan yang tinggi tetapi dengan pembiayaan yang rendah, oleh karena itu perlu ditentukan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Implementasi BOS dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu, komunikasi, sumber daya (manusia dan dana), sikap, dan struktur birokrasi. Implementasi BOS di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan dengan sampel sekolah SMP 1 Tabanan dan SMP 5 Tabanan secara menyeluruh dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur dinilai masih kurang, untuk itu perlu adanya upaya pembenahan dari semua pihak agar setiap tahun menjadi lebih baik lagi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan gambaran yang nyata tentang evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di SMPN 1 Kota Gajah, SMPN 1 Bangunrejo, dan SMPN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Sugiyono (2005:11) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya adalah untuk mengungkapkan berbagai gambaran dan permasalahan dalam masalah pengalokasian Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

#### **B. Fokus Penelitian**

Topik atau fokus penelitian menurut Creswell dalam Tresiana merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah (Tresiana, 2013 :

39). Fokus penelitian ini adalah evaluasi pengelolaan dana BOS. Dana BOS adalah program pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Penelitian ini membahas topik “Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana BOS di 3 SMP Negeri di Kabupaten Lampung tengah Tahun 2017. Fokus penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan di atas :

1. Bagaimana pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Kota Gajah, SMPN 1 Bangunrejo dan SMPN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dana BOS di SMPN 1 Kota Gajah, SMPN 1 Bangunrejo dan SMPN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni SMPN 1 Kota Gajah, SMPN 1 Bangunrejo dan SMPN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan lofland (1984 : 47) dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2007 : 157)

Hasil pengamatan terhadap orang-orang yang diamati atau diwawancarai adalah sumber data utama. Sumber data utama dapat ditulis atau direkam atau melalui pengambilan foto, dokumentasi lain, terbitan pemerintah, jurnal dijadikan referensi atau sumber informasi penting untuk mengecek kebenarannya. Data statistik digunakan sebagai pendukung interpretasi dan analisis yang berasal dari sumber-sumber utama diatas. Berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini, data berupa :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden sebagai data untuk menganalisa penelitian dan diperoleh melalui tanya jawab secara langsung kepada *key informan*. Data primer ini meliputi data tentang evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada atau data yang diambil melalui keterangan atau informasi yang diinginkan serta diperlukan untuk memperjelas data atau permasalahan yang akan diteliti. Data skunder ini diambil dari laporan-laporan atau surat pertanggung jawaban (SPJ), buku, artikel, majalah dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.



### **E. Informan Penelitian**

1. Kepala Sekolah SMPN (Informan 1)
2. Bendahara Sekolah (Informan 2)
3. Komite sekolah (Informan 3)

### **F. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data**

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung terhadap *key informan* yaitu Kepala Sekolah serta responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara.

1. Observasi, yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung berkenaan dengan Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Lampung Tengah
2. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **G. Teknik Analisi Data**

Analisi dalam penelitian penelitian kualitatif , merupakan suatu prose kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dan interaktif yang lazim juga disebut dengan istilah “Cylical analysis”. Tahapan-tahapan analisis data yang harus dilakukan peneliti kualitatif, adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi.

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemilahan, focusing, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan.
3. Tampilan data (Data Display), yaitu kegiatan penyajian data/informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atau kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan.
4. Membuat kesimpulan/verifikasi, yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan.

Menurut Tresiana pada tahap membuat kesimpulan dilakukan juga interpretasi. Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan kategori atau pola tertentu berdasarkan sudut pandang informan (emic meaning) yang telah disusun sebelumnya. (Tresiana, 2013 : 120).

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjaga tingkat kesahihan penelitian, maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk meminimalisir derajat kesaalahan dan perlunya tindakan urgen peneliti untuk menghindari *validity threat* (bias/validitas semu/validitas palsu).

Metode Pembuktian, yakni kesesuaian makna etic dengan makna emic dan perang tanding konsep, model, teori dan hasil temuan penelitian terdahulu. Metode pembuktian (validitas dan reabilitas) diterapkan untuk mengatasi dan menghindari terjadinya bias, yakni : bias peneliti karena faktor subyektivitas nilai, bias key informan, bias berupa arogansi subyektif pandangan informan, bias metode dan data.

Lincoln dan Guba (1985) dalam Tresiana menyebut macam pembuktian dalam kualitatif sebagai “dapat dipercaya” dan “keaslian”. Sementara Creswell (2002) menyebut dengan keabsahan (validitas) dan reabilitas. Menurut Maxwee dalam Oekan (2010), metode validitas (keabsahan) mencakup pada kebenaran (*correctness*). Validitas berkenaan dengan jawaban atas pertanyaan “ apakah penelitian itu benar?”. “Seberapa besartingkat kesalahan yang terjadi?”. Sedangkan metode kredibilitas (*credibility*) merujuk pada suatu deskripsi, kesimpulan, penjelasan (eksplanasi), interpretasi atau yang lainnya (Tresiana, 2013 : 142 -143)

Sehubungan dengan pembuktian ilmiah dalam prosedur penelitian kualitatif, baik validitas dan reabilitas, maka penelitian kualitatif menerapkan prinsip “trangulasi”. Triangulasi menyangkut 4 (empat) hal pokok yaitu :

1. Triangulasi data, yaitu memanfaatkan berbagai sumber data
2. Triangulasi peneliti, yaitu melibatkan berbagai peneliti yang berlatarbelakang keilmuannya.
3. Triangulasi teori, yaitu menggunakan perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan serangkaian data yang terkumpul.
4. Trangulasi metode, penggunaan berbagai metode untuk mempelajari suatu persoalan, termasuk juga dalam triangulasi perpanjangan rentang waktu penelitian dan tindakan lanjut penelitian di masa mendatang. Pada penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

#### **4.1 Profil Organisasi**

##### **1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah**

Visi :

Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya guna, adil dan merata dilandasi dengan iman dan taqwa.

Misi :

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini yang bermutu,
2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
3. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan non formal dan informal yang bermutu dan berdaya saing,
4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan,
5. Meningkatkan manajemen dan tata kelola pendidikan.

Sebagai implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Idealistik, yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. Berorientasi jauh ke depan, yaitu punya jangka waktu tertentu, lima tahun atau lebih.
3. Menjadi motivator, yaitu dapat memberikan semangat bagi pemimpin suatu instansi/organisasi untuk selalu berpacu dalam mencapai misi yang direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah menetapkan tujuan organisasinya sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan.
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas kinerja dan pemerataan tenaga pendidikan.
3. Meningkatnya kualitas kinerja tenaga pengelola pendidikan.
4. Meningkatnya jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan.
5. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan partisipasi masyarakat di bidang PendidikanLuar Sekolah
6. Meningkatnya pemberdayaan dan potensi pemuda.
7. Memperluas dan meningkatkan minat, bakat dan kreativitas siswa melalui olimpiade sains, olah raga dan seni.
8. Meningkatnya penguasaan IPTEK dan relevansinya.
9. Meningkatnya kualitas dan pemasyarakatan Pendidikanpra sekolah.
10. Meningkatnya kualitas PendidikanAnak Usia Dini (PAUDNI)
11. Meningkatnya kualitas wajib belajar Pendidikdasar 9 tahun.
12. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa serta budi pekerti.
13. Meningkatnya pengembangan Pendidikankeaksaraan.
14. Meningkatnya Pendidikankecakapan hidup.
15. Meningkatnya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah (MBS) yang berbasis parenting dan magang.
16. Meningkatnya Pengembangan PendidikanKarakter Bangsa.

Sasaran adalah penjabaran dan tujuan secara terukur dan apa yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dalam

jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tertampungnya tamatan anak usia sekolah diberbagai jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
2. Terwujudnya kinerja tenaga pendidik yang berkualitas.
3. Terpenuhinya tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan.
4. Pemerataan tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan.
5. Terwujudnya tenaga pengelola Pendidikan yang memiliki kemampuan kinerja yang optimal.
6. Tenaga pengelola Pendidikan yang loyal, disiplin serta bertanggung jawab.
7. Tenaga pengelola Pendidikan yang ulet, kreatif mampu meningkatkan karier pada jenjang yang lebih tinggi.
8. Tercapainya sarana dan prasarana Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
9. Terpenuhinya jumlah/modul bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan.
10. Terwujudnya kualitas iman dan taqwa bagi peserta didik, guru dan pegawai.
11. Terpenuhinya guru agama pada semua jenjang Pendidikan yang profesional.
12. Terwujudnya pelaksanaan Pendidikan luar sekolah (PLS) sesuai dengan kebutuhan.
13. Terbentuknya sistem pengendalian Pendidikan luar sekolah.
14. Terwujudnya kegiatan ekstra kurikuler yang berkualitas.
15. Terwujudnya lomba-lomba yang menarik minat, bakat dan kreativitas siswa.
16. Terwujudnya generasi muda yang tangguh, terampil dan berwawasan ke depan.
17. Tumbuhnya kewirausahaan pemuda yang profesional.
18. Penurunan keterlibatan pemuda dalam perilaku menyimpang.
19. Tersedianya sarana/prasarana olahraga di sekolah, klub dan masyarakat.

20. Terbina dan berkembangnya organisasi yang dapat mewadahi kegiatan dan pembibitan.
21. Adanya tempat bagi pelatih untuk mengembangkan profesinya.
22. Tercapainya sumber daya manusia, anak didik sesuai dengan tuntutan IPTEK dan dunia kerja.
23. Peningkatan profesionalisme guru dan pengelola pendidikan.
24. Terselenggaranya pemasyarakatan sekolah luar biasa.
25. Tersajinya data penyandang cacat per desa per kecamatan dan per kabupaten.
26. Terwujudnya tempat belajar bagi penyandang cacat sesuai kebutuhan.
27. Terwujudnya guru pra sekolah yang berkualitas.
28. Terselenggaranya permasyarakatan Pendidikan prasekolah di seluruh lapisan masyarakat.
29. Terwujudnya lembaga Pendidikan prasekolah di setiap kampung.
30. Terwujudnya Pendidikan Tinggi di Lampung Tengah.

Kabupaten Lampung Tengah mempunyai jumlah sekolah yang paling banyak di antara kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah sekolah di Kabupaten Lampung Tengah seluruhnya adalah 1.723 sekolah. Dari jumlah tersebut terdapat 678 PAUD, 722 SD, 202 SMP 3 SLB. Selanjutnya distribusi sekolah per kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 4.1 Jumlah Sekolah di Kabupaten Lampung Tengah**

Kecamatan	JENJANG PENDIDIKAN			GRAND TOTAL
	PAUD	SD	SMP	
Anak Ratu Aji	16	13	4	33
Anak Tuha	24	24	5	53
Bandar Mataram	25	27	13	65
Bandar Surabaya	19	16	4	39
Bangun Rejo	34	38	9	81
Bekri	21	16	6	43
Bumi Nabung	17	22	6	45
Bumi Ratu Nuban	26	14	5	45
Gunung Sugih	30	34	9	73
Kalirejo	31	40	9	80
Kota Gajah	19	23	9	51
Padang Ratu	25	26	9	60
Pubian	19	31	10	60
Punggur	25	27	6	58
Putra Rumbia	16	9	3	28
Rumbia	23	24	7	54
Selagai Lingga	20	26	10	56
Sendang Agung	25	25	7	57
Seputih Agung	20	24	9	53
Seputih Banyak	19	35	7	61
Seputih Mataram	23	30	7	60
Seputih Raman	20	29	5	54
Seputih Surabaya	38	30	5	73
Terbanggi Besar	57	45	17	119
Terusan Nunyai	22	19	6	47
Trimurjo	36	41	6	83
Way Pengubuan	21	19	7	47
Way Seputih	7	15	2	24
	678	722	202	1.602

Sumber Data: *Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah*



**Tabel 4.2. Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang dan Status**

Jenjang	Status Sekolah		Jumlah
	Negeri	Swasta	
SD	120.274	6.740	127.014
SMP	35.418	20.466	55.884
Grand Total	155.692	27.206	182.898

**Tabel 4.3. Distribusi Siswa SMP Kabupaten Lampung Tengah**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kec. Anak Ratu Aji	811
2	Kec. Anak Tuha	852
3	Kec. Bandar Mataram	1987
4	Kec. Bandar Surabaya	976
5	Kec. Bangunrejo	2.123
6	Kec. Bekri	933
7	Kec. Bumi Nabung	600
8	Kec. Bumi Ratu Nuban	860
9	Kec. Gunung Sugih	1.804
10	Kec. Kalirejo	2.503
11	Kec. Kota Gajah	2.328
12	Kec. Padang Ratu	1.713
13	Kec. Pubian	1.834
14	Kec. Punggur	11042
15	Kec. Putra Rumbia	587
16	Kec. Rumbia	1.680
17	Kec. Selagai Lingga	1.106
18	Kec. Sendang Agung	1.711
19	Kec. Seputih Agung	2.149
20	Kec. Seputih Banyak	1.933
21	Kec. Seputih Mataram	1.635
22	Kec. Seputih Raman	1.500
23	Kec. Seputih Surabaya	1.275
24	Kec. Terbanggi Besar	5.419
25	Kec. Terusan Nunyai	1.954
26	Kec. Trimurjo	2.198
27	Kec. Way Pengubuan	1.654
28	Kec. Way Seputih	717
<b>Grand Total</b>		<b>55.884</b>

## 2. SMP Negeri 1 Kota Gajah

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotagajah berdiri pada tahun 1968. Berdasarkan data tahun 2016-2017 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotagajah ini memiliki 52 orang guru dan 713 murid yang dibagi ke dalam murid laki-laki 375 serta murid perempuan 338 dengan jumlah lokal 27 rombel. SMPN 1 Kotagajah beralamat di Jl. M. Mansyur no. 2 Sritejo Kencono Kotagajah Kabupaten Lampung tengah merupakan salah satu sekolah yang masuk dalam jaringan sekolah menengah yang memiliki visi *berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi dan berjiwa mandiri berdasarkan imtaq* dengan bercermin pada :

1. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian,
2. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat,
3. Ingin mencapai keunggulan dalam prestasi,
4. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah,
5. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik,
6. Mengarahkan langkah-langkah strategi (misi) sekolah.

Sedangkan misi SMPN 1 Kotagajah adalah :

1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan etika moral, sehingga menjadi sumber kearifan dan bertindak.
2. Mengkondisikan warga sekolah untuk berdisiplin, jujur dan berbudi pekerti luhur lewat kebersamaan, keteladanan sikap, perilaku serta tindakan.
3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4. Menumbuhkan semangat untuk berprestasi bagi semua warga sekolah.
5. Mengintegrasikan pendidikan ketrampilan/wirausaha pada mata pelajaran muatan lokal dan ekstra kurikuler.

## **2. SMP Negeri 1 Bangunrejo**

SMP Negeri 1 Bangunrejo didirikan pada tahun 1984, atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0557/0/1984 pada tahun ajaran 1984-1985 mulai menerima siswa baru, karena pembangunan gedung belum selesai maka kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di gedung SD Negeri 1 Bangunrejo. Pada bulan November 1984 dengan selesainya pembangunan gedung sekolah maka selanjutnya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di gedung milik sendiri yaitu gedung SMP Negeri 1 Bangunrejo Lampung Tengah.

### **Visi dan Misi SMP Negeri 1 Bangunrejo**

Visi sekolah ini adalah *Menjadikan sekolah yang Berprestasi dan kompetitif berlandaskan iman dan taqwa*”.

Indikator :

- a. Prestasi dalam akademik
- b. Prestasi dalam kegiatan non akademik
- c. Mantap dalam etika, budi pekerti dan disiplin menuju kualitas iman dan taqwa.
- d. Terrwujudnya pengembangan kurikulum sesuai Standar Isi Pendidikan Nasional.
- e. Terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
- f. Meningkatnya lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional.
- g. Mempunyai kualitas sarana prasarana yang mendukung pembelajaran.

- h. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar kompetensi.
- i. Terwujudnya pengelolaan sekolah sesuai manajemen berbasis sekolah.
- j. Terselenggaranya sistem penilaian hasil belajar secara efektif, objektif dan sistematis.
- k. Optimalnya sumber dana dan daya dukung pendanaan sekolah

### **Misi**

- a. Melaksanakan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- b. Melaksanakan pengembangan proses belajar mengajar dan bimbingan secara efektif.
- c. Menumbuhkan semangat keunggulan secara insentif kepada seluruh warga sekolah.
- d. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana dan pengembangan media pembelajaran.
- e. Melaksanakan pengelolaan manajemen sekolah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- f. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.
- g. Meningkatkan penghayatan terhadap pelaksanaan ajaran agama.
- h. Mewujudkan lingkungan sekolah yang indah dan bersih untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif.
- i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun sekolah.

**Tabel 4.2.** Pergantian Kepala SMP Negeri 1 Bangunrejo

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	SALIMUN	1985 – 1997	Pertama
2.	Drs. SUJIANA	1997 – 2002	Kedua
3.	Drs. F. MUKHTARUDDIN	2002 – 2006	Ketiga
4.	DASMAN, S.Pd	2006 – 2012	Keempat
5.	Drs. MAHPUDI	2012 – 2016	Kelima
6.	SUHANDI, S.Pd.	2016 – sekarang	Keenam

Sumber : Dokumen SMP Negeri 1 Bangunrejo

### 3. SMPN 3 Terbanggi Besar

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terbanggi Besar berdiri pada tahun 1988. Berdasarkan data tahun 2017-2018 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terbanggi Besar memiliki 57 orang guru dan 720 murid yang dibagi ke dalam murid laki-laki 323 serta murid perempuan 397 dengan jumlah lokal 22 rombel. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terbanggi Besar yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Bandar jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung tengah merupakan salah satu sekolah yang masuk dalam jajaran sekolah Menengah Pertama yang hadir sebagai upaya untuk memadukan antara nilai imtaq dan iptek, sehingga diharapkan akan melahirkan peserta didik yang memiliki kekuatan iman, ilmu dan amal. Prestasi Guru dan siswa Sekolah Menengah Pertama 3 Terbanggi Besar sejak tahun 1988 sampai tahun 2017 selalu mendapatkan prestasi baik dibidang akademik maupun olahraga, baik pada tingkat kabupaten hingga propinsi, tak heran jika sekolah ini menjadi sekolah favorit di kecamatan terbanggi Besar.

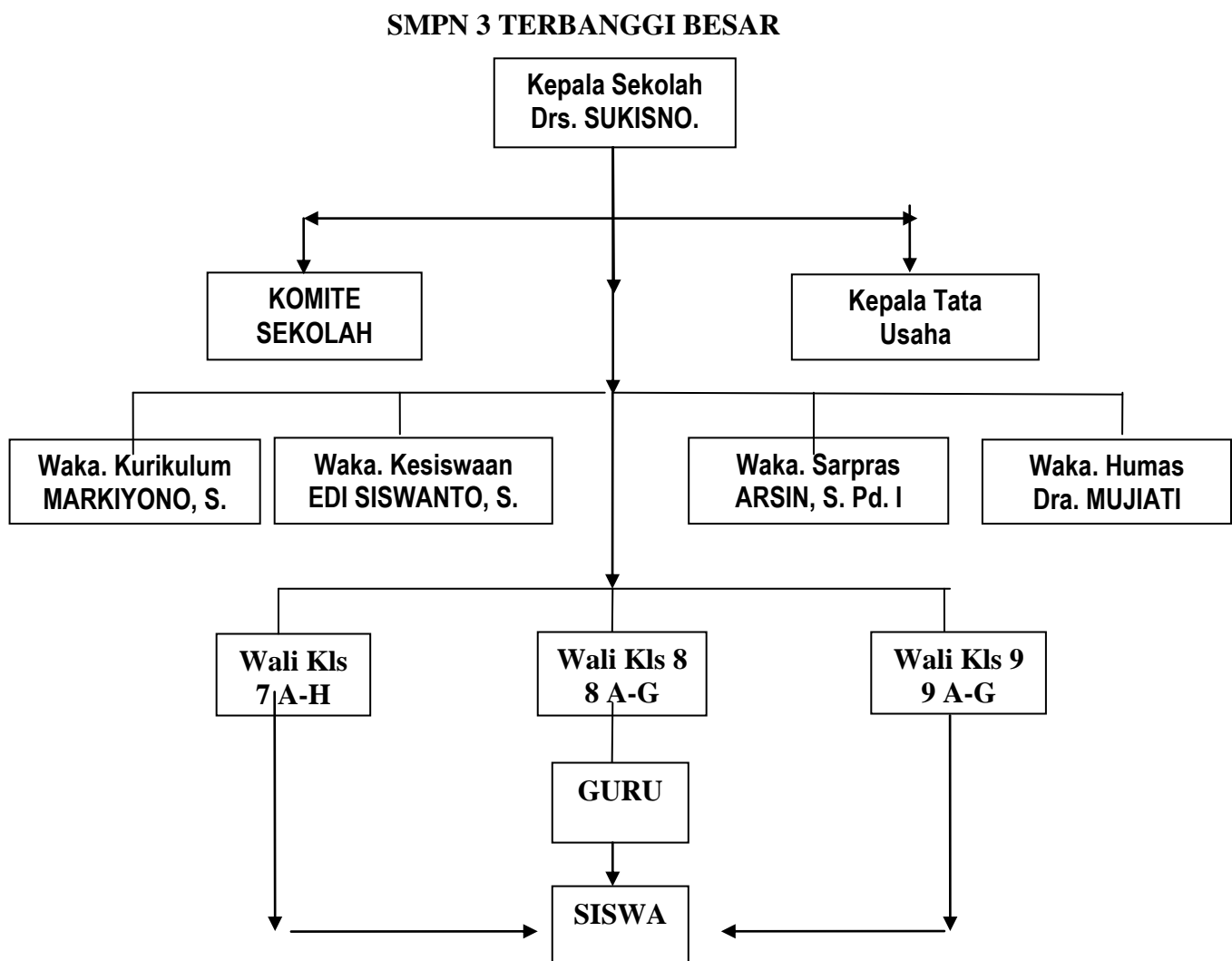
#### Visi dan misi SMPN 3 Terbanggi Besar

Sekolah yang selalu mencetak murid berprestasi ini memiliki visi yaitu *unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa*. Sedangkan misi sekolah ini adalah :

1. Kebiasaan-kebiasaan beribadah/imtaq, hidup bersih, sopan santun, disiplin, dan berbudi pekerti luhur,
2. Pembelajaran yang inovatif dengan strategi/metode/pendekatan yang sesuai,
3. Pencapaian prestasi akademik dan non akademik,

4. Peningkatan SDM pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkepribadian,
5. Sarana prasarana/fasilitas yang memadai,
6. Sistem komputerisasi administrasi sekolah.

#### 4.2 Struktur Organisasi





## VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *good governance* Pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip akuntabel di 3 SMPN di Kabupaten Lampung Tengah dikategorikan cukup akuntabel.
2. Penerapan *good governance* Pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip transparansi di 3 SMPN di Kabupaten Lampung Tengah dikategorikan kurang transparan
3. Penerapan *good governance* Pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip efektif dan efisien di 3 SMPN di Kabupaten Lampung Tengah dikategorikan kurang efektif

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada Sekolah bersama komite sekolah mensosialisasikan kepada orang tua bahwa semua siswa menerima BOS. Hal ini mnyangkut



pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS kepada siswa. juga pertanggungjawaban sekolah kepada Dinas Pendidikan melalui TIM BOS Kabupaten.. Diperlukannya monitoring dan evaluasi oleh tim BOS pusat, dinas kab/kota dan inspektorat pada pengelolaan dan BOS. Sebaiknya monev dilakukan secara rutin per triwulan agar penggunaan tepat sasaran dan terlapor secara baik. Hal ini agar prinsip Transparansi bisa diwujudkan.

2. Sekolah diharapkan dapat memberitahu mengenai kegiatan-kegiatan melalui papan pengumuman yang terkait penggunaan dana BOS. Selain itu juga laporan penggunaan dana BOS perlu dipublikaasikan melalui rapat komite agar orang tua mengetahui pengelolaan dana BOS di sekolah.tersebut.
3. Diperlukan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis bagi sumberdaya manusia khususnya pengelola BOS agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu juga diharapkan ketepatan waktu dalam pencairan dana BOS agar penggunaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS bisa tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 2010. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Akbar, Usman 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. Al-Adawy
- Akdon. 2009. *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta
- Amtu, O. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Ashari, Edy Topo dan Desi Fernanda. 2001. *Membangun KePemerintahan Yang Baik*. Bahan Ajar DiklatPim III. Lembaga Administrasi Negara Republik
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. Halim
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Dwi Setyawan 2015 *.Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah*.
- Fauzan 2013 *“Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*
- Fattah, Nanang. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Juran. Joseph M. 1993. *Quality Planning and Analysis*. Third edition.
- Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara
- Kemdiknas. 2010. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah BOS Untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*
- Kemdiknas dan Kemenag. 2011. *Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah: Pedoman Penyusunan Untuk Kepala Sekolah/Madrasah*. Hasil Kerjasama Bilateral Kementerian Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama dengan USAID

- Koswara, E. 2010. *Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif*. <http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan-manajemen-keuangan-sekolah.html>. Diakses tanggal 4 Januari 2013
- Kusno 2017 *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Di Sekolah Dasar Negeri*.
- Lasari, E. 2011. *Manajemen Keuangan Sekolah*. <http://winawimala.wordpress.com/2011/04/11/manajemen-keuangan-sekolah/>. Diakses tanggal 4 Januari 2013
- Lincoln and Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry*, New Delhi: Sage Publication
- Makhya, Syarief. 2004. *Ilmu Pemerintahan: Telaahan Awal* Buku Ajar. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Manullang, M 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Meutia dan Rochman. 2000. *Membangun Pemerintahan Demokratis*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Nandiarossa, Withaniar Vinka. 2013. “*Analisis Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kota Magelang*”. *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Nur Khafifah Julia Dwi 2010. *Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah BOS di sekolah dasar Negeri I Patuk Kabupaten Gunungkidul*.
- Permana, J. 2005. *Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Sumber Dana*. Bahan Diklat Manajemen Berbasis Sekolah MTs. Angkatan III Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.
- Puspitawati, S. 2006. *Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Sebagai Upaya Mencerdaskan Anak Bangsa*. Artikel Website Bulan November.

[www.ham.go.id/download.php?id=185533...1](http://www.ham.go.id/download.php?id=185533...1). Diakses tanggal 5 Januari 2013

- Raeni. 2014. "*Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK Kajian Persepsi Guru SMK Se-Kabupaten Kendal*". Skripsi. Semarang: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Riyanto. Bambang 2001. *Dasar - dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi. Keempat. Yogyakarta.
- Sailis . 2006. *Total Quality Management in Education* Manajemen Mutu. Pendidikan.
- Sa'ud, U. S dan Makmun, A. S. 2009. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sagala, S. 2010. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government Pemerintahan yang baik*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setyanti. 2011. *Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Sinambela, Lijan 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Solihat, Eli, dan Toto Sugiharto. 2009. "*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orangtua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta*". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 2 Vol. 14. Hal 135-143.
- Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukma 2016 *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas BOS SMA Di SMA Negeri Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014*.
- Suyanto, Slamet. 2005. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta
- Sutedjo. 2009. "*Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah; Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal*". Tesis. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP.

- Suti, Marsus. 2011. "Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonom Pendidikan". *Jurnal MEDTEK*, volume 2, Nomor 3.
- Sutikno, Tri admaji. 2009. "*Indikator Produktivitas Kerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan*". *Jurnal teknologi dan kejuruan*, volume 32, Nomor 1. Hal 107-118.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Lampung: Lembaga. Penelitian Universitas Lampung
- Wahyuni 2011 "*Keefektifan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Sekolah Dasar pada Daerah Miskin di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat*".
- Zamroni. 2008. *Paradigma pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: BIDRAF.
- Zainuddin, H. M. 2008. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar